



**Opini Hukum**

Pencarian

**Berita Terkini >>**

- Ini Beberapa Keanehan Quick Count yang Menangkan Jokowi
- Jokowi Hendak Minta Bantuan, Yusril Tolak Mentah-mentah
- Timkamnas Prabowo – Hatta Ajak Pendukung Bersikap Optimis Sambut Kemenangan
- PBB: Gaza Kini Berada di Ujung Tanduk
- Fadli Zon: Hitung Cepat Bukan Berarti Hitung Tepat
- Pemerintah Perlu Atur Secara Tegas Lembaga Survey

**Pemilu 2014**  
**Pemilu Itu Penting; Tapi Lebih Penting Bagaimana Menjalankannya?**  
Saturday 29 Mar 2014 16:50:54



Ilustrasi. Partai Politik RI Peserta Pemilu 2014. (Foto: Istimewa)

Oleh: Kamaruddin Hasan

SAYA KIRA, banyak diantara kita sudah sangat paham bahkan menjiwai serta menjalankan proses pemilu. Paham betul definisi pemilu, tujuan, strategi, output dari proses pemilu. Namun demikian, tidak sedikitpula element masyarakat yang belum paham dengan pemilu dan tujuannya, apalagi pemilih pemula. Jangankan pemilih pemula dan masyarakat awam, pengurus parpol, caleg, capres, penyelenggara pemilu, pengawas, media massa, tim sukses,

simpatisan, bahkan kalangan terdidik sekalipun yang sehari-hari bersinggungan secara langsung dengan politik, juga terlalu banyak yang tidak paham esensi dari pemilu itu sendiri.

Hal ini baru pada tataran pemahaman tentang pemilu dan tujuannya, apalagi tentang bagaimana menjalankan proses pemilu yang baik dan benar, yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Bukankan Ilmu tentang Pemilu itu penting? Namun yang lebih penting adalah Ilmu bagaimana menjalankan pemilu yang benar, baik, jujur, terbuka, bebas sesuai dengan prinsip demokrasi. Lihat saja realitas atau fenomena kekinian dalam proses jelang pemilu legeslatif 9 April 2014 dan jelang pilpres Juli 2014, terlalu banyak yang gamang, eforia,

**Berita Terkini >>**

**Ini Beberapa Keanehan Quick Count yang Menangkan Jokowi**



JAKARTA, Berita HUKUM - Peneliti opini publik, Agung Prihatna mengungkap beberapa fenomena keanehan

**Jokowi Hendak Minta Bantuan, Yusril Tolak Mentah-mentah**



JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Syuro PBB Prof Yusril Ihza Mahendera berpegang teguh terhadap

**Timkamnas Prabowo – Hatta Ajak Pendukung Bersikap Optimis Sambut Kemenangan**

JAKARTA, Berita



## Berita Utama >

- Fadli Zon: Hitung Cepat Bukan Berarti Hitung Tepat
- KPU Jelaskan Perkembangan Pemungutan Suara Pilpres 2014
- Hakikatnya Pilpres 2014
- Tim Jokowi-JK Tertangkap Lakukan Serangan Fajar
- Jarno Wakapolda Metro Jaya Pantau Langsung Keamanan TPS VIP
- Presiden PKS Anis Matta: Kobarkan Semangat Indonesia!!

## SPONSOR & PARTNERS

sindrom kekerasan, dengan pelanggaran yang tidak tercatat jumlahnya. Artinya, jangankan ilmu tentang bagaimana menjalankan pemilu, ilmu tentang pemilu saja masih sangat minim.

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu tidak lain merupakan instisari dari proses demokrasi. Kalau kita mengacu pada undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum pada bagian pertimbangan, menimbang bahwa untuk memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang aspiratif, berkulitas, dan bertanggung jawab.

Pada bagian pertimbangan yang lain, dibentuk UU ini (bagian b) bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Demikian juga dalam Bab I ketentuan umum ditegaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.

Dalam pernyataan umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas. Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan ini berkaitan dengan tidak dipisahkan dengan hak berikutnya dalam ayat 2 yaitu: bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh akses yang sama pada pelayanan oleh pemerintahan dalam negerinya.

Pemilu merupakan mengejawantahkan hak-hak asasinya rakyat dalam bidang politik, guna menentukan pejabat legislatif dan eksekutif sebagai perwakilan yang akan menyelenggarakan kebijakan pemerintahan/negara. Pemilu merupakan anak kandung demokrasi yang dijalankan sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam realitas pemerintahan atau ketatanegaraan.

Prinsip-prinsip dalam pemilu yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat atau demokrasi ditandai bahwa setiap warga



JAKARTA, Berita HUKUM - Pemilihan Presiden telah selesai dilaksanakan pada 9 Juli 2014 kemarin, berb

## PBB: Gaza Kini Berada di Ujung Tanduk



PALESTINA, Berita HUKUM - Situasi di Jalur Gaza berada di ujung tanduk, kata Sekretaris Jenderal PBB

## Fadli Zon: Hitung Cepat Bukan Berarti Hitung Tepat



JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan sikap tetap mendukung

## Pemerintah Perlu Atur Secara Tegas Lembaga Survey



JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Tantony Yahya meminta kepada

negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah daerah atau negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Pemilu adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan/representative government. Karena dengan Pemilu, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif. Pemilu juga sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal.

Robert Dahl, menyebutkan Pemilu merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilu menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu daerah atau negara. Demokrasi sendiri secara sederhana merupakan suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, bebas, rahasia dan berkala. Pemilu memfasilitasi sirkulasi elit, baik antara elit yang satu dengan yang lainnya, maupun pergantian dari kelas elit yang lebih rendah yang kemudian naik ke kelas elit yang lebih tinggi. Sirkulasi ini akan berjalan dengan sukses dan tanpa kekerasan jika pemilu diadakan dengan adil dan demokratis. Pemilu sebagai salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu daerah atau negara adalah dari bagaimana perjalanan Pemilu.

Pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama, sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dalam sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah, berdasarkan hukum yang disepakati bersama, tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. fungsi legitimasi politik ini, menurut Ginsberg, merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yaitu untuk mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadik dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik daerah dan nasional.

Paling tidak ada tiga alasan mengapa pemilu bisa menjadi sarana legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilu pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilu, pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warganegara. Ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan/coercion untuk mempertahankan legitimasinya.

Antonio Gramsci bahkan menunjukkan bahwa kesepakatan (consent) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dan otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.

## Pengesahan RUU MD3 Diwarnai WO dan Hujan Interupsi



Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan pengesahan RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) akhirnya di

## Advokat Gugat Ketentuan Wajib Sumpah di Pengadilan Tinggi



JAKARTA, Berita HUKUM - Lagi-lagi Undang-Undang (UU) Advokat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ka

Pemilu kini telah menjadi token of membership bagi sebuah Negara jika ingin bergabung dalam sebuah masa peradaban yang bernama demokrasi. Dalam konteks ini pemilu adalah salah satu ornament paling penting dalam modernitas politik. Semenjak demokrasi dan manifestasi proseduralnya menjadi pilihan yang nyaris bagi penyelenggaraan daerah atau Negara. Pemilu juga merupakan salah satu ukuran terpenting bagi derajat partisipasi politik. Pemilu menjadi arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari rakyat yang memenuhi syarat untuk dipilih.

Penting juga untuk menjadi catatan dalam membahas masalah pemilu, yakni prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu pemilu yang dilaksanakan secara *luber dan jurdil*, yang mengandung pengertian bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara demokratis dan transparan berdasarkan pada asas-asas pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil.

Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia yang berumur 17 tahun atau telah pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Sedangkan warga Negara yang berumur 21 tahun berhak untuk dipilih.

Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna yang menjamin kesempatan yang berlaku secara holistik bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi atau pengecualian misalnya acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakannya setiap warga Negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan.

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggara, pelaksana, pemerintah, partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

Pemilu sebagai sebuah cara menata sistem, memerlukan pemilu sebagai alat untuk mengimplementasikan sistemnya. Demokrasi membutuhkan pemilu, sebab hanya pemilu yang memungkinkan bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya untuk duduk di pemerintahan (baik sebagai anggota legislatif maupun pimpinan eksekutif), dan sekaligus menghukum mereka yang tidak profesional dalam mengemban amanat rakyat, dengan cara tidak memilihnya (kembali).

Pemilu memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:

Pertama, keterwakilan Politik, artinya Pemilu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda (ideologi, oritensi politik, suku, ras, agama, dll), sehingga lembaga perwakilan rakyat benar-benar mencerminkan kondisi masyarakatnya.

Kedua, Integrasi, artinya pemilu adalah sarana untuk mengkanalisasi perbedaan-perbedaan kepentingan yang ada di dalam masyarakat, sehingga potensi konflik dapat diredam dan disalurkan secara efektif lewat lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan

Ketiga, pemerintahan Efektif, pemilu sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan yang efektif, karena pejabat-pejabat yang terpilih mendapat dukungan nyata (legitimasi) dari masyarakat. (kh/bhc/sya)

Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unimal Aceh  
Ketua Development for Research and Empowerment (DeRE-Indonesia)

  
Comment using... ▾

 Facebook social plugin



## Berita Terkait Pemilu 2014



Ini Beberapa Keanehan Quick Count yang Menangkan Jokowi



Jokowi Hendak Minta Bantuan, Yusril Tolak Mentah-mentah



Timkamnas Prabowo – Hatta Ajak Pendukung Bersikap Optimis Sambut

## Kemenangan



Fadli Zon: Hitung Cepat Bukan Berarti Hitung Tepat

KPU Jelaskan Perkembangan Pemungutan Suara Pilpres 2014

Saling Klaim, Presiden Minta Kedua Kubu Capres Tidak Kerahkan Massa ke Jalan

Traffic Rank  
beritahukum.com

394,159

Powered by  Alexa

[Beranda](#) | [Tentang Kami](#) | [Hubungi](#) | [Redaksi](#) | [Partner](#) | [Karir](#) | [Info iklan](#) | [Disclaimer](#) | [Mobile](#)



Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com

**KPU RI: Penggunaan KTP/KK/Paspor/ identitas kependudukan lainnya serenda**

Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: [info@beritahukum.com](mailto:info@beritahukum.com)